KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pertamina-Swasta Belum Sepakat, BBM Segera Habis
Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Pertamina-Swasta Belum Sepakat, BBM Segera Habis

Akibat kualitas yang tak sesuai, SPBU swasta belum membeli BBM impor dari Pertamina. Stok BBM swasta terancam segera habis. Perlu solusi segera agar konsumen tak terabaikan.

JAKARTA, KOMPAS — Peritel bensin swasta belum membeli bahan bakar minyak dari PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi kelangkaan stok. Salah satu alasannya, kualitas kandungan bensin impor milik Pertamina belum sesuai. Pada saat yang sama, stok bensin swasta akan habis total dalam waktu dekat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat untuk membahas kelangkaan stok BBM swasta di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025), Komisi XII DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau ulang kebijakan agar berpihak kepada masyarakat dan iklim usaha.

Hadir pula lima perwakilan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) swasta, yaitu PT Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (APR/BP-AKR), PT AKR Corporindo Tbk (AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), dan ExxonMobil Lubricants Indonesia (ExxonMobil).

Wakil Direktur PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan, pihaknya menyepakati kolaborasi penyediaan BBM murni (*base fuel*), atau bensin tanpa zat aditif dan pewarna, untuk SPBU swasta pada 19 September 2025. Pertamina diharapkan mengimpor 1,2 juta barel BBM Ron 92 dan 270.000 barel BBM Ron 98 untuk kebutuhan swasta hingga akhir 2025.

Namun, sejak pengadaan awal 100.000 barel BBM, pada Rabu (24/9), belum ada pihak swasta yang membeli. "Awalnya, dua SPBU swasta berkenan beli BBM *base fuel* sampai Jumat kemarin, yaitu BP-AKR dan Vivo. Namun, Vivo kemudian membatalkan untuk tidak melanjutkan. BP-AKR juga akhirnya tidak," tuturnya.

Kandungan etanol

Alasan BP-AKR dan Vivo menolak BBM yang diimpor Pertamina adalah adanya kandungan etanol sebesar 3,5 persen. Komposisi etanol dalam jumlah tersebut di bawah ambang batas yang diperkenankan, yakni maksimal 20 persen. Swasta pun akhirnya tidak melanjutkan pembelian. Kabar baiknya, ujar Achmad, kandungan dalam kargo BBM berikutnya dapat disesuaikan. Badan usaha swasta pun berkenan melakukan negosiasi ulang, kecuali Shell Indonesia yang belum melanjutkan negosiasi karena kendala birokrasi internal.

Perwakilan Direksi Vivo Energy Indonesia juga membenarkan pembatalan pembelian BBM yang diimpor Pertamina karena masalah teknis. "Tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi kembali dengan Pertamina ke depan, agar apa yang kami minta bisa dipenuhi," katanya.

Perusahaan asal Singapura itu berencana menambah tiga operasional SPBU baru di Indonesia tahun ini. Namun, ekspansi itu terkendala keterbatasan stok BBM yang akan habis pertengahan Oktober.

Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menyampaikan, selain faktor kandungan etanol, mereka membutuhkan tambahan dokumen sertifikat asal barang sesuai aturan perusahaan induk. "Untuk memastikan BBM yang kami pakai sesuai standar internasional dan tidak berasal dari negara yang diembargo," ucapnya.

President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menambahkan, mereka masih terus berkoordinasi dengan perusahaan global untuk menanggapi solusi yang diberikan pemerintah.

Kebutuhan Pasokan Tambahan Bensin SPBU Swasta sampai Akhir 2025
(kiloliter)



Stok segera habis

Di tengah kesepakatan yang menggantung, SPBU swasta, yang menguasai 5 persen pangsa pasar BBM nonsubsidi, menyampaikan akan kehabisan produk BBM dalam waktu dekat. Situasi ini pun mengancam keberlangsungan usaha SPBU swasta. Stok BBM Vivo akan habis kurang dari sebulan, sementara Shell yang memiliki hampir 200 SPBU di Jawa akan kehabisan seluruh stok BBM, Kamis (2/10).

Adapun BP-AKR kemungkinan akan habis akhir bulan ini, sementara mayoritas SPBU AKR Corporindo sudah kehabisan bensin. ExxonMobil, yang memiliki 1.200 pom mini di Pulau Jawa, masih menjaga stok BBM Ron 92 hingga triwulan IV-2025.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengakui ada perubahan pola konsumsi BBM oleh masyarakat yang menyebabkan permintaan Pertalite turun dan beralih ke BBM RON tinggi. Perubahan pola konsumsi ini mengubah pangsa pasar BBM nonsubsidi dari hanya 11 persen menjadi 15 persen hingga tengah tahun. Laode memprediksi penjualan bensin subsidi bakal turun 1,4 juta kl tahun ini. Sebaliknya, penjualan bensin nonsubsidi Pertamina naik 0,86 juta kl dan produk non-Pertamina naik sebesar 0,64 juta kl.

Di tengah kelangkaan stok BBM ini, pemerintah meminta pelaku usaha menyesuaikan kebutuhan mereka untuk tahun depan. "Untuk antisipasi, mereka sudah buat perencanaan di 2026 biar masalah ini tidak kejadian lagi," katanya.

Menanggapi kondisi terkini, Komisi XII DPR, dalam kesimpulannya, mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk segera mengevaluasi dan menyiapkan kebijakan alternatif yang dapat mencegah kelangkaan pasokan BBM serta kegaduhan di masyarakat.

(ERK)